



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

- Nama** : DHETIK ARIYANTO
- Jabatan** : DIREKTUR OPERASI II
- NHK** : 245718

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.420.808.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
- Tanah Seluas 10.123 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 470 m2/416 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 70.808.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **222.000.000**

- MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
- MOBIL, LEXUS JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **156.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **3.197.335.609**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **5.996.143.609**

III. HUTANG **Rp.** **135.774.832**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **5.860.368.777**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.